

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Setelah dilakukan pengumpulan data yang berupa laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Se propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2013 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), selanjutnya peneliti melakukan analisis data. Analisis data ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum terhadap Belanja Modal.

Teknik analisis yang digunakan terdiri dari analisis deskriptif dan analisis statistik. Analisis deskriptif yaitu analisis yang menjelaskan tentang gambaran data-data variabel penelitian yang terdiri dari rata-rata, standar deviasi, nilai tertinggi dan nilai terendah. Sedangkan analisis statistik merupakan analisis yang dilakukan dengan pembuktian statistik untuk membuktikan hipotesis penelitian. Dalam penelitian ini analisis statistik digunakan analisis OLS.

4.1 Analisis Deskriptif

Hasil analisis deskriptif terhadap variabel penelitian dapat ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Statistik Deskriptif (dalam rupiah)

| | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
|---------------------|----|-------------------|---------------|------------------|----------------|
| PAD | 35 | 25.239.543 | 304.797.499 | 113.220.170,11 | 79.143.691 |
| DAU | 35 | 365.042.000 | 891.589.912 | 556.240.495,26 | 136.451.857 |
| Belanja Modal | 35 | 40.810.477 | 297.896.000 | 112.027.253,09 | 48.867.044 |
| Pertumbuhan Ekonomi | 35 | 1.588.000.00 0 | 7.069.000.000 | 4.201.885.714,29 | 1.682.370.435 |
| Valid N (listwise) | 35 | | | | |

Sumber : Data BPS DI. Yogyakarta, diolah 2015

Hasil deskriptif terhadap PAD memiliki rata-rata sebesar Rp. 113.220.170,11 dan standar deviasi sebesar Rp. 79.143.691. PAD tertinggi terjadi pada angka Rp. 304.797.499 yaitu Kota Yogyakarta tahun 2013 dan terendah mencapai nilai Rp. 25.239.543 yaitu kabupaten Gunung Kidul tahun 2008.

Hasil deskriptif terhadap DAU memiliki rata-rata sebesar Rp. 556.240.495.26 dan standar deviasi sebesar 136.451.857. DAU tertinggi sebesar Rp.

891.589.912 di kabupaten Sleman tahun 2013 dan DAU terendah terjadi pada nilai Rp. 365.042.000 yaitu di kota Yogyakarta tahun 2007.

Hasil analisis statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel 4.1, jumlah kabupaten yang menjadi sampel adalah 5 kabupaten / kota Se Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Nilai rata-rata Belanja Modal adalah sebesar Rp. 112.027.253,09 dan standar deviasi sebesar Rp. 48.867.044. Nilai Belanja modal tertinggi adalah sebesar Rp. 297.896.000 yaitu Kabupaten Bantul tahun 2008 dan nilai terendah adalah sebesar Rp. 40.810.477, yaitu kabupaten Kulon Progo tahun 2009.

Deskriptif terhadap pertumbuhan ekonomi memiliki rata-rata sebesar Rp.4,201 milyar dan standar deviasi sebesar 1,682 milyar . Pertumbuhan Ekonomi tertinggi sebesar Rp. 7,069 milyar yaitu pada Kabupaten Sleman tahun 2012 dan terendah sebesar Rp.1.588 milyar yaitu kabupaten Kulonprogo tahun 2007.

4.2. Hasil Uji Model Regresi Panel

4.2.1. Pemilihan model dalam pengolahan data

Pemilihan model yang digunakan dalam sebuah penelitian perlu dilakukan berdasarkan pertimbangan statistik. Hal ini di tunjukkan untuk memperoleh dugaan yang efisien. Untuk itu, perlu dilihat masing-masing hasil estimasi dari berbagai model panel data sebagai berikut:

1. *Chow Test* (uji F-statistik)

Uji ini digunakan untuk memilih model yang akan digunakan antara model estimasi *Common Effect* atau model estimasi *Fixed Effect*, dengan uji hipotesis:

- c. H_0 : memilih menggunakan model estimasi *Common Effect*.
- d. H_1 : memilih menggunakan model estimasi *fixed effect*.

Uji ini dapat dilakukan dengan melihat *p-value* apa bila signifikan (kurang dari 5%) maka model yang digunakan adalah *fixed effect*, apabila *p-value* tidak signifikan (lebih dari 5 %) maka model yang digunakan adalah model estimasi *common effect*.

Tabel 4.2
Hasil Uji *Chow Test* Belanja Modal

| Effects Test | Statistic | d.f. | Prob. |
|--------------------------|-----------|--------|--------|
| Cross-section F | 2.741899 | (4,27) | 0.0491 |
| Cross-section Chi-square | 11.931367 | 4 | 0.0179 |

Sumber: Olahan data Eviews 8.0

Nilai distribusi statistik *F Test* dari perhitungan menggunakan *Eviews 8.0* adalah sebesar 2.741899 dengan probabilitas 0.0491 (lebih kecil dari 5 %), sehingga statistik H_0 ditolak dan menerima H_1 , menurut hasil estimasi ini model yang tepat digunakan adalah model estimasi *Fixed effect*.

2. Uji Hausman

Uji Hausman ini digunakan untuk memilih model yang akan di gunakan antara model estimasi *Fixed Effect* atau model estimasi *Random Effect*, dengan uji hipotesis sebagai berikut:

- a. H_0 : memilih menggunakan model estimasi *Random Effect*.
- b. H_1 : memilih menggunakan model estimasi *Fixed Effect*.

Uji Hausman ini dapat dilakukan dengan melihat *p-value*, apabila *p-value* signifikan (kurang dari 5%) maka model yang di gunakan adalah model estimasi *Fixed Effect*, sebaliknya bila *p-value* tidak signifikan (lebih dari 5%) maka model yang digunakan adalah model estimasi *Random Effect*.

Tabel 4.3

Hasil Uji Hausman Belanja Modal

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

| Test Summary | Chi-Sq. Statistic | Chi-Sq. d.f. | Prob. |
|----------------------|-------------------|--------------|--------|
| Cross-section random | 10.000690 | 3 | 0.0186 |

Sumber : Olahan Data Eviews 8.0

Nilai distribusi statistik *Chi Square* dari perhitungan diatas adalah sebesar 10,000690 probabilitas 0.0186 (lebih kecil dari 5%), sehingga secara statistik H1 diterima dan Ho ditolak. Maka model yang digunakan adalah model estimasi *Fixed Effect*. Dari hasil pemilihan model maka dapat disimpulkan bahwa model regresi yang terpilih adalah *Fixed Effect*.

4.2.2. Estimasi Model Regresi dengan *Fixed Effect*

Fixed effect sudah memperhatikan keragaman atau heterogenitas daerah yakni dengan mengasumsikan bahwa intersep antar kelompok kabupaten berbeda, sedangkan *slope*-nya dianggap sama. Pengertian *Fixed effect* didasarkan adanya perbedaan intersep antara daerah namun sama antar waktu (*time invariant*), sedangkan koefisien regresi (*slope*) dianggap tetap baik antar kelompok individu maupun antar-waktu.

Tabel 4.4**Hasil Estimasi *Fixed Effect***

Dependent Variable: BM?

Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)

Date: 06/10/15 Time: 21:02

Sample: 2007 2013

Included observations: 7

Cross-sections included: 5

Total pool (balanced) observations: 35

Linear estimation after one-step weighting matrix

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|---------------------------------------|-------------|--------------------|-------------|--------|
| C | 11.97717 | 6.435678 | 1.861058 | 0.0737 |
| PAD? | -0.312701 | 0.226934 | -1.377937 | 0.1795 |
| DAU? | 2.822353 | 0.339231 | 8.319851 | 0.0000 |
| PDRB? | -2.726415 | 0.913076 | -2.985968 | 0.0059 |
| Fixed Effects (Cross) | | | | |
| YOGYAKARTA—C | 0.678776 | | | |
| SLEMAN—C | 0.464957 | | | |
| BANTUL—C | -0.030354 | | | |
| KULON_PROGO--C | -0.885093 | | | |
| GUNUNG_KIDUL--C | -0.228286 | | | |
| Effects Specification | | | | |
| Cross-section fixed (dummy variables) | | | | |
| Weighted Statistics | | | | |
| R-squared | 0.836988 | Mean dependent var | 12.35646 | |
| Adjusted R-squared | 0.794725 | S.D. dependent var | 6.937951 | |
| S.E. of regression | 0.120796 | Sum squared resid | 0.393978 | |
| F-statistic | 19.80450 | Durbin-Watson stat | 2.631944 | |
| Prob(F-statistic) | 0.000000 | | | |
| Unweighted Statistics | | | | |
| R-squared | 0.595673 | Mean dependent var | 8.014112 | |
| Sum squared resid | 0.430910 | Durbin-Watson stat | 2.529531 | |

$$BM = 11,97717 - 0.312701 \text{ PAD} + 2,822353 \text{ DAU} - 2,726415 \text{ PDRB} + \varepsilon$$

$$BM \text{ Yogya} = 12.655946 - 0,312701 \text{ PAD} + 2.822353 \text{ DAU} - 726415 \text{ PDRB} + \varepsilon$$

$$\text{BM sleman} = 12.442127 - 0,312701 \text{ PAD} + 2.822353 \text{ DAU} - 726415 \text{ PDRB} + \varepsilon$$

$$\text{BM bantu} = 11.946816 - 0,312701 \text{ PAD} + 2.822353 \text{ DAU} - 726415 \text{ PDRB} + \varepsilon$$

$$\text{BM K_progo} = 11.092077 - 0,312701 \text{ PAD} + 2.822353 \text{ DAU} - 726415 \text{ PDRB} + \varepsilon$$

$$\text{BM G_Kidul} = 11.748884 - 0,312701 \text{ PAD} + 2.822353 \text{ DAU} - 726415 \text{ PDRB} + \varepsilon$$

4.3. Pengujian Hipotesis

4.3.1. Uji T (Pengujian Variabel secara individu)

Hasil uji t pada masing-masing model dapat ditunjukkan pada Tabel 4.4

a. Pengujian Variabel PAD

Koefisien variabel dari PAD terhadap Belanja Modal adalah sebesar -0.312701 dan t-hitung sebesar -1.377937 sedangkan probabilitas sebesar 0.1795 ($p > 5\%$). Secara statistik menunjukkan bahwa variabel PAD tidak berpengaruh terhadap variabel Belanja Modal. Dengan demikian hipotesis pertama yang menyatakan “Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap anggaran belanja modal (BM)” tidak dapat didukung.

b. Pengujian terhadap DAU

Koefisien variabel dari DAU terhadap Belanja Modal adalah sebesar 2.822353 dan t-hitung sebesar 8.319851 sedangkan probabilitas sebesar 0,000 ($p < 5\%$). Secara statistik menunjukkan bahwa variabel DAU berpengaruh positif signifikan terhadap variabel Belanja Modal. Dengan demikian

hipotesis kedua yang menyatakan “Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap anggaran belanja modal (BM)” dapat didukung.

c. Pengujian Variabel Pertumbuhan Ekonomi

Koefisien variabel dari Pertumbuhan ekonomi terhadap Belanja Modal adalah sebesar -2,726415 dan t-hitung sebesar -2.985968 sedangkan probabilitas sebesar 0.0059 ($p < 5\%$), secara statistik menunjukkan bahwa variabel Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif signifikan terhadap variabel Belanja Modal. Dengan demikian hipotesis ketiga yang menyatakan “Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap anggaran belanja modal (BM)” tidak dapat didukung.

d. Pengujian Konstanta Per Daerah

Ditinjau dari konstanta per daerah menunjukkan bahwa Yogyakarta memiliki konstanta paling tinggi yaitu sebesar 12.655946, yang berarti Yogyakarta memiliki belanja modal paling tinggi di saat daerah tidak mengalami perubahan pada PAD, DAU dan PDRB. Urutan berikutnya adalah kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul dan yang terakhir adalah Kabupaten Kulon Progo. Dengan demikian keberhasilan otonomi daerah paling baik terjadi pada Kota Yogyakarta. Ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi di masing-masing daerah belum merata.

4.3.2. Uji F (Uji hipotesis Koefisien Regresi secara menyeluruh)

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen bersama-sama mempengaruhi variabel dependen atau tidak. F-hitung (F-statistik) dengan menggunakan perhitungan Eviews 8.0 diketahui sebesar 19,80450 dan probabilitasnya sebesar 0.00000 ($p < \alpha$ 5%), sehingga dapat disimpulkan bahwa secara estimasi *Fixed Effect*, variabel independen yang terdiri dari PAD, DAU dan Pertumbuhan Ekonomi bersama-sama signifikan mempengaruhi Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Propinsi DIY.

4.3.3. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) adalah sesuatu yang menunjukkan seberapa besar variabel dependen dapat di jelaskan oleh variabel independen. Model estimasi dengan *Fixed effect*, R^2 sebesar 0,595673 sehingga variabel Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Propinsi DIY dapat di jelaskan oleh variabel PAD, DAU dan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 59,56% dan sisanya 40,44% di jelaskan oleh variabel lain.

4.4 Pembahasan dan Implikasi

4.4.1. Pengaruh PAD Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Propinsi DIY. Bahkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Putro (2014) menyatakan bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Hasil penelitian ini menunjukkan hubungan PAD dengan belanja modal adalah negatif terhadap Belanja Modal, berarti bahwa PAD berlawanan dengan Belanja Modal.

Hubungan antara PAD dan Belanja Modal adalah negatif, hal ini kemungkinan disebabkan karena kecilnya dana atau pendapatan daerah yang digunakan untuk belanja modal atau investasi, artinya PAD sangat kecil dibandingkan kebutuhan atau belanja yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah, hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat masih tinggi walaupun sudah ada otonomi daerah. Selama ini belanja modal lebih banyak digunakan untuk belanja tanah, gedung, jalan dan peralatan yang belum berdampak terhadap pendapatan daerah dalam jangka pendek. Stine (1994) menyatakan bahwa penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program – program layanan publik, sehingga mampu meningkatkan pendapatan

daerah, baik dari pajak maupun retribusi. Karena kecilnya penyerapan pendapatan pemerintah daerah yang digunakan untuk belanja, maka hubungan antara PAD dan belanja modal adalah berlawanan.

Sebagai contoh pada tahun 2007 di Kota Yogyakarta PAD sangat besar yaitu mencapai Rp.114.098.351.000 sedangkan belanja modal hanya sebesar Rp.89.982.394.000 hal ini berarti pemerintah Kota Yogyakarta belum bisa memanfaatkan secara optimal sumber pendapatannya untuk investasi atau pembiayaan pembangunan, sehingga hubungan antara PAD dan Belanja Modal negatif atau berlawanan. Hal ini disebabkan karena kemampuan daerah untuk mempertahankan dan meningkatkan pengelolaan anggaran untuk investasi produktif dapat dikatakan terbatas, sehingga nilai belanja modal sangat rendah, hal ini mungkin karena kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) masih kurang dan kemampuan manajemen anggaran maupun pembangunan masih sangat terbatas, dan tidak efektifnya pemerintah daerah dalam menerapkan berbagai peraturan juga menyebabkan pengelolaan anggaran tidak optimal.

Menurut Ahyani (2010) tidak efektifnya berbagai peraturan yang dilakukan pemerintah bisa jadi menunjukkan tidak adanya relasi positif antara berbagai pungutan baru itu dengan kesungguhan pemerintah daerah dalam meningkatkan mutu layanan publik. Selain itu pembebanan biaya atas barang maupun jasa yang ditawarkan yang harus ditanggung oleh perusahaan daerah turut serta mengurangi output yang dihasilkan. Dengan kurang maksimalnya manajemen anggaran daerah

tentu akan mempengaruhi pengelolaan belanja modal di daerah tersebut. Jadi sangat penting untuk pemerintah daerah memaksimalkan sektor pendapatannya agar mendapat output yang maksimal di setiap sektornya. Walaupun seperti yang sudah dijelaskan pada regresi diatas bahwa Pendapatan Asli Daerah pengaruhnya tidak signifikan. Ini menjelaskan bahwa sebenarnya Pendapatan Asli Daerah memberi pengaruh yang negatif terhadap Belanja Modal itu sendiri

4.4.2. Pengaruh DAU terhadap Belanja Modal

Hasil penelitian menemukan bahwa DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Hal ini menunjukkan semakin besar DAU maka belanja modal juga semakin meningkat, demikian juga sebaliknya semakin rendah DAU maka belanja modal akan semakin menurun. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Darwanto dan Yustikasari (2014) yang menyimpulkan bahwa DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

DAU diharapkan cukup untuk menutup celah antara kebutuhan minimum dengan kemampuan keuangan maksimum. DAU diarahkan untuk mengatasi ketidakseimbangan fiskal secara vertikal antar tingkat pemerintahan dalam memberi pelayanan dan merangsang mobilisasi sumber-sumber penghasilan. Jumlah dana ditentukan melalui analisis celah fiskal –kebutuhan fiskal dikurangi kapasitas fiskal – yang berarti bahwa formula ini mengakui kemampuan fiskal pemerintah daerah untuk membiayai pengeluarannya.

Berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, hal tersebut merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan didalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan pemerintah daerah secara leluasa dapat menggunakan dana ini apakah untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat atau untuk keperluan lain yang tidak penting. Dengan demikian besarnya Dana Alokasi Umum, akan mempengaruhi besarnya anggaran akan digunakan pemerintah daerah dalam mengalokasikan Belanja daerahnya.

4.4.3. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Propinsi DIY. Bahkan hasil penelitian sebaliknya berpengaruh negatif signifikan terhadap Belanja Modal. Hasil penelitian juga mendukung penelitian Putro (2010) yang menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.

Hal ini kemungkinan disebabkan karena adanya unsur politik di dalam APBD provinsi Yogyakarta serta masih tingginya ketimpangan sosial dan disparitas yang sangat besar terhadap kondisi ekonomi antar daerah di Propinsi DIY. Perbedaan ini sangat terlihat jika dibandingkan PDRB antara kabupaten Kulon Progo dengan

Kabupaten Sleman atau Kota Yogyakarta, dimana pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kulonprogo paling rendah dibandingkan kabupaten lainnya. Minimnya sumber daya alam, minimnya industri baik industri jasa maupun produk menyebabkan Pendapatan Regionalnya sangat rendah. Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman yang merupakan daerah perkotaan dengan perputaran uang yang sangat besar akan memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih dominan dibandingkan dengan daerah lain, yang mayoritas investasi daerahnya cukup rendah. Sementara usaha-usaha daerah untuk mensejajarkan dengan daerah lain terus dilakukan, sehingga daerah-daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi relatif rendah tetap mengalokasikan belanja modal yang besar, untuk dapat sejajar dengan daerah-daerah lainnya. Hal ini menyebabkan justru arah yang berlawanan atau terjadi pengaruh negatif signifikan antara pertumbuhan ekonomi dengan Belanja Modal.

Alasan lain karena otonomi daerah yang belum seluruhnya berhasil, terbukti dari masih tinggi dana perimbangan dari pemerintah pusat, yang menunjukkan bahwa daerah tetap dapat mengalokasikan anggaran belanja daerah yang besar karena mendapatkan dana dari pemerintah pusat melalui DAU, DAK dan Bagi hasil.